

**ANALISIS KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007-2016**

JURNAL ILMIAH

**Disusun Oleh:
Muhammad Gyda Aulia
(145020107111031)**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

ANALISIS KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007-2016

Muhammad Gyda Aulia*, Dwi Budi Santoso**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: muhammad.dyg@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2016. Konvergensi dan divergensi pertumbuhan ekonomi merupakan isu ekonomi regional. Konsep konvergensi terjadi jika daerah dengan ekonomi tertinggal cenderung tumbuh lebih cepat daripada daerah dengan ekonomi maju sedangkan divergensi terjadi sebaliknya. Jawa Barat merupakan provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar ketiga di Indonesia dan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun memiliki ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang tinggi juga dengan rata-rata Indeks Wiliamson sebesar 0,71. Berdasarkan konsep Kurva Kuznet U terbalik, keadaan Jawa Barat yang demikian berada pada fase penurunan ketimpangan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan ketimpangan yang rendah melalui percepatan konvergensi dengan mengetahui tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data panel dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat antara tahun 2007-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa karakteristik pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bersifat konvergen pada tingkat yang rendah sehingga perlu adanya peningkatan percepatan konvergensi yang dapat ditempuh melalui 4 (empat) kebijakan perekonomian, yaitu: (i) peningkatan produksi sektor pertanian sebagai konsumsi rumah tangga dan bahan baku sektor industri agar terjadi peningkatan value added, (ii) pemerataan sektor perdagangan serta memperluas pusat-pusat perdagangan terutama pada daerah tertinggal, (iii) ditingkatkannya anggaran bidang kesehatan di daerah-daerah tertinggal dan (iv) peningkatan efektivitas struktur belanja pemerintah terutama pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan.

Kata kunci: Konvergensi, Divergensi, Ketimpangan Pembangunan, Percepatan Konvergensi.

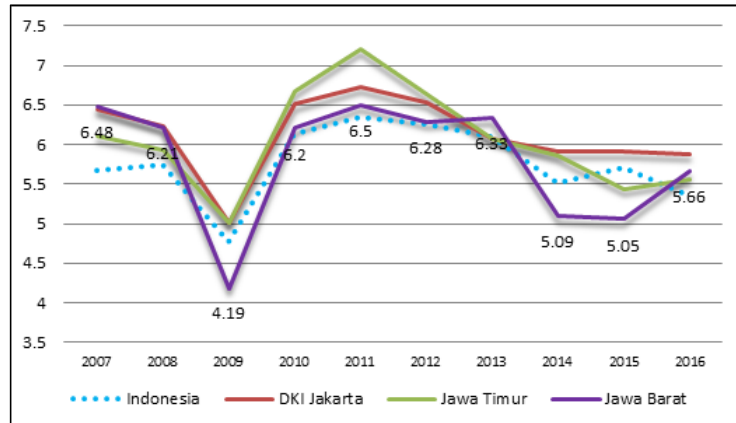
A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan sebagai target utama setiap wilayah yang ada di dunia. Asumsinya adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut. Lebih dari itu, hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mampu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Namun, pada kenyataannya tidaklah demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak diikuti dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Gasparini & Lustig, 2011). Menurut Gasparini & Lustig (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*The rise and fall of income inequality in Latin America*” membuktikan bahwa negara-negara yang berada di Amerika Latin memiliki pendapatan ekonomi yang tinggi disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga, namun hal tersebut tidak memicu pemerataan pada wilayah tersebut, sehingga isu ketimpangan yang terjadi adalah terjadinya ketidakstabilan perekonomian, krisis yang berulang dan ketidakstabilan sosiopolitik. Fenomena pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat yang memiliki akses mudah terhadap faktor-faktor perekonomian dan pada akhirnya hal ini akan mengarah pada ketimpangan pendapatan individu ataupun ketimpangan pembangunan yang terjadi pada wilayah tersebut.

Secara spesifik, Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi perhatian utama dalam integrasi pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini terkait mengenai peranan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian nasional. Dimana, rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2016 relatif tinggi, yaitu

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,72% dan memiliki kontribusi PDRB terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, pada Gambar 1.1 menunjukkan komparasi laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat pada tahun 2007-2016.

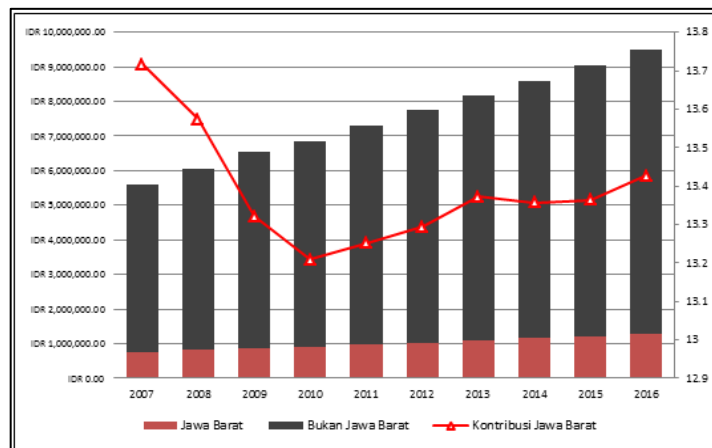
Gambar 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat Tahun 2007-2016 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Diolah)

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta adalah tiga provinsi yang menjadi pilar utama perekonomian Indonesia pada tahun 2007-2016. Hal ini cukup beralasan mengingat setiap terjadi penurunan ataupun peningkatan pada pertumbuhan ekonomi pada ketiga wilayah tersebut, maka akan mempengaruhi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Spesifik pada Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dicapai adalah pada tahun 2011 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2009 dengan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai angka 4,19%.

Gambar 2: Kontribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Terhadap PDRB Indonesia Tahun 2007-2016 (Miliar Rupiah)



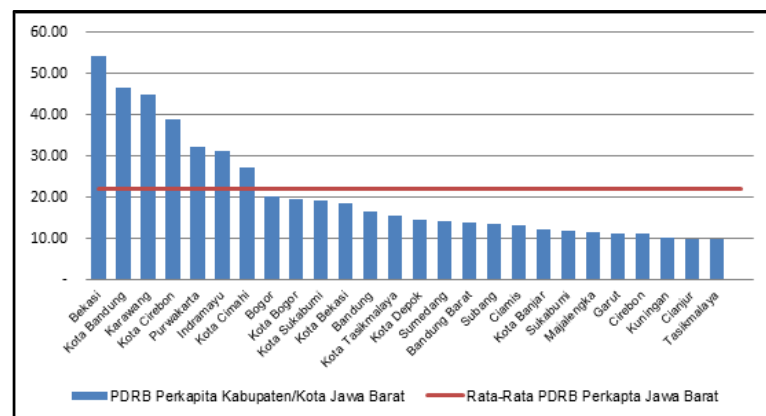
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Diolah)

Sebagaimana yang diilustrasikan dalam Gambar 1, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007-2009 dan 2014-2015, hal itu tetap tidak mengurangi kontribusi PDRB Provinsi Jawa Barat terhadap perekonomian nasional yang tetap signifikan pada angka 13,44% dari total jumlah PDRB Indonesia. Selain itu, ketika pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat menurun, maka dapat dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung ikut menurun juga seperti pada tahun 2008-2009 dan tahun 2013-2015. Sementara dari gambar 2 dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2016 adalah provinsi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Indonesia, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,909,62 miliar rupiah setiap tahun atau sebesar 13,38% dari total PDRB Indonesia. Dengan demikian, Provinsi

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang patut diperhitungkan pembangunannya karena memiliki kontribusi yang besar terhadap intergrasi pembangunan Indonesia.

Namun demikian, dilihat dalam lingkup lebih mendalam pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, nampaknya tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dirasakan oleh beberapa daerah. Jika ditinjau dari PDRB perkapita, lebih dari 70% kabupaten/kota di Jawa Barat berada di bawah rata-rata PDRB perkapita provinsi. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kesejahteraan penduduk antardaerah walaupun tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kesejahteraan rakyat karena ada daerah yang PDRB per kapita-nya besar tetapi kebanyakan masyarakatnya masih dalam keadaan miskin. Daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya dapat menghasilkan PDRB yang lebih besar, namun hasilnya belum tentu menetes ke bawah, sehingga masyarakat miskin tidak dapat merasakan kekayaan yang dimiliki. Hal ini mengisyaratkan terjadinya ketimpangan wilayah di Jawa Barat. Artinya, ada beberapa daerah yang sangat kaya sedangkan daerah lainnya miskin atau bahkan sangat miskin.

Gambar 3: Rata-Rata PDRB Perkapita 26 Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2007-2016 (Juta Rupiah)

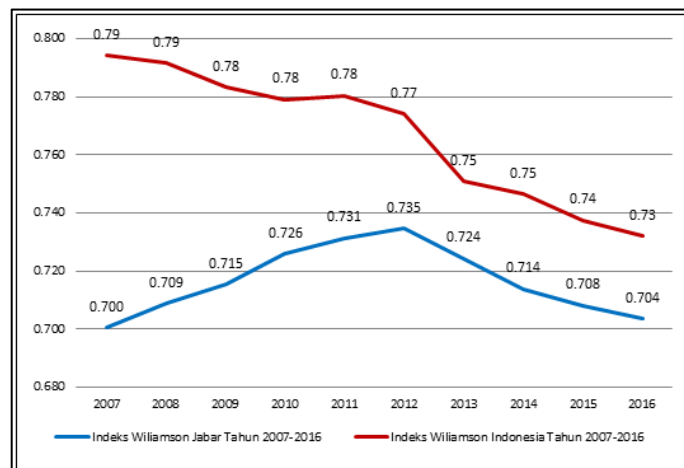


Sumber: BPS Jawa Barat, 2019 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa terdapat variasi PDRB perkapita antar 26 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2016. Jika menggunakan angka rata-rata Jawa Barat yaitu Rp 22,23 juta, maka kabupaten kota di Jawa Barat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, hanya terdapat 7 wilayah yang memiliki PDRB perkapita diatas rata-rata yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta dan Kota Cimahi. Kedua, terdapat 19 wilayah yang memiliki PDRB perkapita dibawah rata-rata Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur. Secara spesifik, Kabupaten Bekasi adalah wilayah yang memiliki PDRB perkapita tertinggi dengan angka Rp. 54,04 juta sedangkan wilayah dengan PDRB terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan angka PDRB perkapita sebesar Rp.9,84 juta. Adanya gap (jurang) yang tinggi antara wilayah terkaya dengan termiskin mengindikasikan terjadinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Sehingga, isu yang muncul dengan adanya ketimpangan PDRB perkapita di setiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat adalah mempercepat pertumbuhan wilayah tertinggal dan mengejar ketertinggalan (catching up effect) dari wilayah yang sudah maju.

Begitupun demikian, kondisi suatu wilayah dan masyarakat selalu memiliki kondisi awal yang berbeda, sehingga perkembanganyapun dimungkinkan berbeda. Dengan kata lain, kondisi merata murni hampir mustahil ditemukan. Namun, perkembangan antar waktu beserta intervensi kebijakan pemerintah hendaknya dapat menyelaraskan atau menuju kearah yang lebih merata. Oleh karena itu, analisis antar waktu terhadap kesenjangan sosial dan wilayah akan memberikan arti yang lebih penting, dimana salah satu cara analisisnya adalah melalui indeks wiliamson. Ketidakmerataan dan ketimpangan yang terjadi lebih tergambarkan melalui indeks wiliamson dimana semakin mendekati angka 0 maka tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah semakin rendah dan jika mendekati angka 1 maka tingkat ketimpangan pembangunan semakin tinggi. Gambar.4 menunjukkan perbandingan Indeks Wiliamson Jawa Barat dan Indonesisa selama tahun 2007-2016.

Gambar 4: Indeks Wiliamson Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2007-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui selama tahun 2007-2016 Indeks Wiliamson Jawa Barat berada di bawah Indeks Wiliamson Indonesia, namun jika dilihat dari angka rata-rata Indeks Wiliamson Jawa Barat kategori ketimpangannya termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi yaitu berada pada angka lebih dari 0,5. Secara grafik Indeks Wiliamson Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2012 lalu mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016. Fenomena ini menandakan terjadinya titik puncak ketimpangan pembangunan dan kemudian terjadi kecenderungan penurunan ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun berikutnya yang akan datang. Sehingga ketika ketimpangan pembangunan Provinsi Jawa Barat menurun maka diharapkan dapat menurunkan ketimpangan pembangunan Indonesia

Dalam model neoklasik dikatakan bahwa terjadinya ketimpangan ataupun disparitas dalam pertumbuhan suatu negara atau daerah merupakan sebuah hal yang bersifat sementara. Model pertumbuhan neoklasik yang diinisiasi oleh Solow mengasumsikan adanya diminishing return dari pertumbuhan modal dan adanya constant return to scale. Sehingga, berdasarkan konsep neoklasik, pertumbuhan pada akhirnya akan mencapai kondisi steady state dan akan tercipta konvergensi pertumbuhan ekonomi di setiap negara atau daerah. Menurut Solow (1956) dalam model neoklasik ada tiga faktor yang menjadi sumber pertumbuhan, yaitu: (i) stok modal, (ii) angkatan kerja, dan (iii) teknologi. Dimana, asumsi pada model ini adalah tidak adanya hambatan untuk faktor produksi yang bergerak ke setiap daerah (no barrier to entry) dan informasi sempurna (zero information cost). Berdasarkan asumsi ini pula, selanjutnya terjadi pergerakan tenaga kerja dari daerah yang memiliki upah rendah ke daerah yang memiliki upah lebih tinggi dan pergerakan modal dengan arah yang berlawanan. Model akhir pada pertumbuhan neoklasik adalah akan terdapatnya konvergensi pendapatan perkapita dalam jangka panjang (Armstrong, 2000).

Pada dasarnya, konvergensi adalah suatu tendensi dari wilayah miskin atau tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya (catching up effect) dari wilayah yang kaya atau lebih maju (Barro & Sala-i-Martin, 1992). Konvergensi terjadi ketika daerah dengan ekonomi miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada daerah dengan ekonomi kaya. Dengan demikian, daerah miskin cenderung mampu mengejar daerah kaya dalam hal tingkat pendapatan per kapita sehingga tujuan dari pembangunan daerah tersebut tercapai. Konvergensi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (i) konvergensi absolut, dan (ii) konvergensi kondisional. Jika pada satu daerah tidak banyak memiliki perbedaan karakteristik struktural, maka hasil analisis konvergensi absolut maupun kondisional memberikan hasil yang sama. Sebaliknya, jika objek penelitian memiliki karakteristik yang berbeda, maka hasil analisis konvergensi kondisional bisa berbeda dengan konvergensi absolut.

Meskipun Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki PDRB tinggi dan berkontribusi cukup besar terhadap PDRB Indonesia, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh penduduk Jawa Barat yang terbagi menjadi 26 kabupaten/kota. Dalam kata lain, terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan diantara penduduk kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, tingkat kesenjangan tersebut masih dikategorikan dalam tingkat kesenjangan tinggi. Maka dari itu perlu adanya pembenahan mengingat tujuan utama dari pembangunan adalah

untuk mencapai konvergensi pertumbuhan ekonomi pada seluruh daerah pembangunan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat apakah memiliki kecenderungan semakin seragam (konvergen) atau semakin timpang (divergen).

B. TINJAUAN PUSTAKA

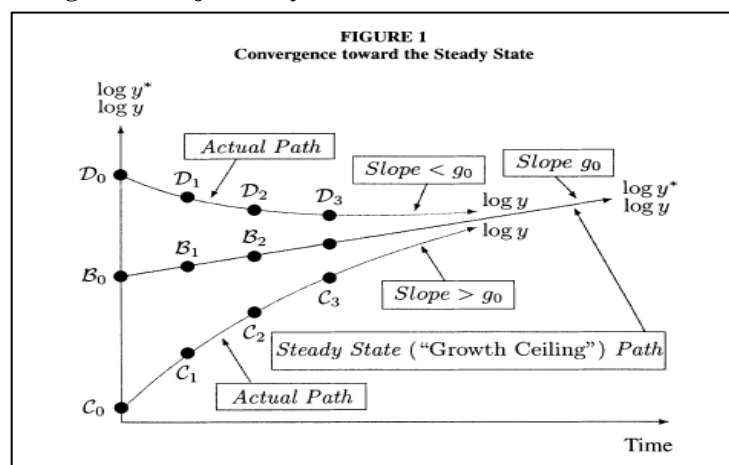
Teori Konvergensi

Secara umum konvergensi yang dimaksudkan pada penelitian ini dapat dipahami sebagai proses pengurangan kesenjangan pendapatan antar daerah sehingga dapat dipahami pula sebagai proses pengejaran ketertinggalan daerah berpenghasilan rendah terhadap daerah berpenghasilan tinggi. Kesenjangan pendapatan yang dicoba dikurangi melalui proses konvergensi dihitung berdasarkan pendapatan riil perkapita.

Teori konvergensi merupakan konsep turunan dari model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Pengertian konvergensi secara statistik adalah proses penurunan dispersi dari sekelompok data menuju satu nilai tertentu dari waktu ke waktu (Barro & Sala-i-Martin, 1992). Menurut Barro & Sala-i-Martin (1992) mengartikan konvergensi sebagai adanya tendensi wilayah-wilayah tertinggal mengejar ketertinggalannya (*catching up effect*) dari wilayah kaya karena pertumbuhan ekonomi mereka sangat mengagumkan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara maju akan mengalami kondisi *steady state*, yaitu negara yang tingkat pendapatannya tidak dapat meningkat lagi karena tambahan investasi tidak menambah pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena seluruh biaya produksi sudah tertutupi oleh investasi yang ada, sehingga tambahan tabungan (*saving*) di negara tersebut tidak dapat dijadikan tambahan investasi. Di negara dengan kondisi *steady state* tambahan modal tidak lagi berguna karena akan menyebabkan rasio modal per tenaga kerja semakin besar sehingga malah menurunkan return atas modal. Sementara itu, negara-negara berkembang memiliki tingkat investasi di bawah biaya produksi, sehingga tambahan modal di negara tersebut akan dijadikan tambahan investasi dan akhirnya menambah pendapatan negara tersebut.

Teori pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada perkembangan dari faktor-faktor produksi adalah teori pertumbuhan neoklasik. Teori neoklasik menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat pendapatan perkapita awal. Oleh sebab itu, apabila dalam suatu negara atau wilayah secara ekonomi mempunyai kesamaan utilitas dan fungsi produksi, maka negara atau wilayah tertinggal dapat secara relatif memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan negara atau wilayah yang lebih kaya, atau dalam pengertian sederhana disebut konvergensi (Barro & Sala-i-Martin, 1992), yang kemudian mampu diilustrasikan pada gambar 5 berikut ini.

Gambar 5: Konvergensi Menuju Steady State



Sumber: Valdés (2003)

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bagaimana terjadinya *catching up effect* dari wilayah-wilayah tertinggal terhadap wilayah maju dimana $\log y$ adalah pendapatan perkapita dan Time adalah waktu. Titik D_0, D_1, D_2, D_3 dan D_4 merupakan jalur pertumbuhan perekonomian wilayah maju, sedangkan titik C_0, C_1, C_2, C_3 dan C_4 merupakan jalur pertumbuhan ekonomi wilayah

tertinggal atau berkembang. Kemudian dapat terlihat jalur pertumbuhan perekonomian wilayah maju tidak dapat meningkat lagi atau memiliki kecenderungan pertumbuhan ekonomi rendah sehingga mendekati steady state path (jalur pada titik B). Sedangkan untuk wilayah tertinggal mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus sehingga pada akhirnya akan mendekati steady state path. Dengan demikian, ketika wilayah maju dan wilayah tertinggal bertemu pada garis steady state path maka hipotesis konvergensi pertumbuhan ekonomi telah terjadi. Dalam konteks ini, proses konvergensi yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konvergensi sigma dan konvergensi beta.

Barro & Sala-i Martin (1992) menyatakan konvergensi terjadi manakala perekonomian daerah miskin cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah yang relatif kaya. Hal ini mengindikasikan terdapatnya hubungan yang negatif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat pendapatan per kapita pada awal periode yang kemudian disebut dengan β -convergence. β -convergence memiliki satu kelebihan utama yaitu analisisnya bersifat dinamis. Kecepatan konvergensi dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap β -convergence. Salah satu konsep yang terkait dengan kecepatan konvergensi adalah the half-life of convergence yang artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menutup setengah dari kesenjangan awal. β -convergence terdiri dari dua hipotesa, yaitu absolute convergence dan conditional convergence.

Absolute convergence sendiri dikatakan terjadi ketika terdapat hubungan negatif antara PDRB per kapita awal dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita selama periode yang diteliti. Barro & Sala-i-Martin (1992) menggunakan absolute convergence dalam studi antar daerah dalam satu negara. Hipotesis absolute convergence ini sulit diterima karena dalam kenyataan pertumbuhan ekonomi regional tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan per kapita awal saja.

Sedangkan yang dimaksud dengan conditional convergence adalah konvergensi yang dihitung dengan menggunakan pendapatan awal dari suatu daerah dan juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi konvergensi perekonomian. Menurut Wibisono (2003), dengan melakukan tes hipotesis conditional convergence maka akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, yaitu dapat mengetahui faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka panjang.

Model standar pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan tergantung dari perekonomian awal. Hubungan yang negatif antara pendapatan dengan tingkat pertumbuhan mengindikasikan bahwa daerah kaya mengalami pertumbuhan ekonomi rendah yang menunjukkan pendapatan cenderung konvergen secara mutlak. Proses konvergen seperti ini disebut dengan konvergensi mutlak (absolute convergence). Oleh karena kenyataannya bahwa antardaerah mempunyai karakteristik perekonomian yang beragam mengakibatkan dugaan proses konvergensi mutlak dinilai menjadi lemah sehingga konvergensi mutlak umumnya diikuti oleh konvergensi bersyarat (conditional convergence). Untuk melihat konsep konvergensi absolut tersebut, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = \beta_0 + \beta_1 \ln y_{i,t_0} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan:

$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}}$ = Pertumbuhan pendapatan perkapita per tahun pada tahun akhir t

y_{i,t_0} = Pendapatan perkapita awal di kabupaten/kota i

i, t = Kabupaten/kota dan jumlah tahun dalam periode observasi,

β_0, β_1 = Parameter yang diestimasi

ε_i = error yang terdistribusi secara normal dan independen.

Hipotesis konvergensi beta absolut digunakan untuk menguji hipotesis pada model pertumbuhan neoklasik bahwa wilayah yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada wilayah yang kaya, tanpa mensyaratkan karakteristik perekonomian lainnya (Barro & Sala-i-Martin, 1992). Hipotesis beta absolut terjadi apabila estimasi terhadap β adalah signifikan dan bernilai negatif.

Cara lain yang digunakan untuk dalam konvergensi β adalah dengan cara konvergensi beta bersyarat yang dilakukan dengan melihat perilaku dan karakteristik antarnegara atau antardaerah dalam suatu negara. Wibisono (2003) menyatakan dengan melakukan tes hipotesis konvergensi beta bersyarat maka akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, yaitu dapat mengetahui faktor-faktor penentu apa saja yang memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka panjang, dengan cara memasukkan variabel-variabel terpilih yang dianggap memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional ke dalam persamaan.

Untuk melihat konsep konvergensi kondisional/bersyarat tersebut, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = \beta_0 + \alpha_0 \ln y_{i,t_0} + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \ln y_{i,1} X_{1it} + \ln y_{i,2} X_{2it} \dots n + \varepsilon_i \dots (2.2)$$

Keterangan:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = \text{Pertumbuhan pendapatan perkapita per tahun pada tahun akhir } t$$

α_0 = Tingkat konvergensi

$y_{i,t}$ = Pendapatan per kapita tahun t setiap kota

y_{i,t_0} = Pendapatan per kapita awal tahun t_0 setiap kota

β = Konstanta

α = Koefisien regresi

ei = Error Term

X_{it} = Variabel yang diduga mempengaruhi konvergensi pertumbuhan ekonomi

Menurut Paas et al (2007), ketika konvergensi beta sudah dapat di estimasi maka tahapan selanjutnya adalah untuk menghitung kecepatan konvergensi yang dilambangkan dengan β dalam persamaan berikut ini:

$$\beta = \frac{(\ln(b+1))}{T} \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana β adalah koefisien kecepatan konvergensi, b adalah koefisien variabel dan T adalah lama periode waktu. Persamaan di atas juga dapat digunakan untuk memperlihatkan seberapa cepat tingkat PDRB perkapita atau variabel yang dihasilkan dapat mencapai mencapai pada kondisi steady state, atau dikenal dengan kecepatan konvergensi (speed of convergence). Kemudian ketika kecepatan konvergensi telah mampu di estimasi maka tahapan berikutnya adalah menentukan lama waktu half time convergence yang memiliki pengertian waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan separuh gap yang terjadi dengan melalui persamaan sebagai berikut:

$$H = \frac{\ln 2}{\frac{(\ln(b+1))}{T}} \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana H adalah half time convergence, b adalah koefisien variabel dan T adalah lama periode waktu.

C. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Wilayah yang menjadi objek penelitian ini adalah 26 kabupaten kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur. Sementara Kabupaten Pangandaran tidak masuk kedalam objek penelitian yang dikarenakan adanya keterbatasan dalam data penelitian. Sedangkan unit analisis dan jangka waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 (sepuluh) tahun, mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan bersifat data panel, yaitu data yang menggabungkan data deret berkala (time series) dan data deret lintang (cross section). Data panel yang digunakan adalah data time series dari tahun 2007-2016 dan cross section sebanyak 26 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Perimbangan Keuangan (DJPK).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (library study), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan bidang studi dan permasalahan yang akan diteliti kemudian dihubungkan satu sama lainnya sehingga diperoleh hasil yang akan membantu dalam menjawab permasalahan yang ada.

Variabel Operasional

Variabel penelitian merupakan construct atau konsep yang dapat diukur dengan nilai tertentu yang berguna untuk memberikan gambaran nyata mengenai fenomena yang ingin diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan pendapatan perkapita dari 26 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat pada tahun 2007-2016. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan, PDRB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, jumlah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan jumlah pengeluaran pemerintah bidang kesehatan.

Model Analisis

A. Konvergensi Beta Absolut

Asumsi yang terdapat dalam hipotesis konvergensi beta (β -convergence) absolut adalah adanya korelasi negatif antara tingkat pendapatan per kapita periode awal dengan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya, daerah dengan ekonomi miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada daerah dengan ekonomi kaya sehingga daerah miskin cenderung mengejar daerah kaya dan akan melakukan proses catching up effect dalam jangka panjang. Dalam menguji konvergensi beta absolut secara regional digunakan data panel dengan pertumbuhan pendapatan per kapita sebagai variabel dependen dan tingkat pendapatan per kapita awal sebagai variabel independen.

Untuk meneliti konsep beta absolut digunakan persamaan dari Barro & Sala-i-Martin (1992), yaitu sebagai berikut:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = \beta_0 + \beta_1 \ln y_{i,t_0} + \varepsilon_i$$

dimana, $\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}}$ adalah tingkat pertumbuhan rata-rata; y_{i,t_0} adalah pendapatan per kapita awal di provinsi i , t adalah jumlah tahun dalam periode observasi, β_0, β_1 adalah parameter yang diestimasi, dan ε_i adalah error yang terdistribusi secara normal dan independen. Hipotesis beta absolut terjadi apabila estimasi terhadap β adalah signifikan dan bernilai negatif.

B. Konvergensi Beta Bersyarat

Konvergensi beta (β -convergence) bersyarat memiliki hipotesis bahwa terdapat korelasi negatif antara tingkat pendapatan perkapita awal dan tingkat pertumbuhan terjadi jika karakteristik struktural/non pertumbuhan (seperti kebijakan pemerintah, kondisi geografi, modal manusia, jumlah tenaga kerja, dan lain sebagainya) dipertimbangkan dalam perekonomian. Model konvergensi beta bersyarat mengestimasi dua efek pada pertumbuhan ekonomi. Pertama, efek negatif yang diharapkan dari pendapatan per kapita awal melalui nilai estimasi β , untuk menangkap adanya fenomena konvergensi. Kedua, efek setiap variabel bebas pada pertumbuhan ekonomi, dimana variabel-variabel tersebut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi atau memperburuk pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana terjadinya proses tersebut dikontrol oleh variabel lain

Persamaan untuk menguji adanya konvergensi beta bersyarat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = \beta_0 + \alpha_0 \ln y_{i,t_0} + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \ln y_{i,1} X_{1it} + \ln y_{i,2} X_{2it} \dots n + \varepsilon_i$$

yang kemudian dijabarkan menjadi:

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}} = & \beta_0 + \alpha_0 \ln y_{i,t_0} + \alpha_1 \text{Pertanian}_{it} + \alpha_2 \text{Perdagangan}_{it} + \alpha_3 \text{GovKes}_{it} + \alpha_4 \text{GovPend}_{it} \\ & + \gamma_1 \text{Pertanian}_{it} + \gamma_2 \text{Perdagangan}_{it} + \gamma_3 \text{GovKes}_{it} + \gamma_4 \text{GovPend}_{it} + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Keterangan:

$\frac{1}{T} \ln \frac{y_{i,t_0+T}}{y_{i,t_0}}$ = Rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita periode t setiap kabupaten/kota

$\beta_1 = \alpha_0$ = Tingkat konvergensi

y_{i,t_0+T} = Pendapatan perkapita tahun t setiap kabupaten/kota

y_{i,t_0} = Pendapatan perkapita awal tahun t_0 setiap kabupaten/kota

X_{1it} = Faktor Kebijakan yang diduga mempercepat konvergensi pertumbuhan ekonomi

tahun t setiap kabupaten/kota
Pertanian = PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan di setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
Perdagangan = PDRB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
GovKes = Anggaran pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
GovPen = Anggaran pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

Menurut Paas et al (2007), ketika konvergensi beta sudah dapat di estimasi maka tahapan selanjutnya adalah untuk menghitung kecepatan konvergensi yang dilambangkan dengan β dalam persamaan berikut ini:

$$\beta = \frac{\ln(b+1)}{T}$$

Dimana β adalah koefisien kecepatan konvergensi, b adalah koefisien variabel dan T adalah lama periode waktu. Persamaan di atas juga dapat digunakan untuk memperlihatkan seberapa cepat tingkat PDRB perkapita atau variabel yang dihasilkan dapat mencapai kondisi *steady state*, atau dikenal dengan kecepatan konvergensi (*speed of convergence*). Kemudian ketika kecepatan konvergensi telah mampu di estimasi maka tahapan berikutnya adalah menentukan lama waktu *half time convergence* yang memiliki pengertian waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan separuh gap yang terjadi dengan melalui persamaan sebagai berikut:

$$H = \frac{\ln 2}{\beta}$$

Dimana H adalah *half time convergence*, b adalah koefisien variabel dan T adalah lama periode waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik

A. Hasil Uji Konvergensi Tanpa Adanya Perubahan Kebijakan

Berdasarkan hipotesis yang ada dalam teori konvergensi absolut, dapat disimpulkan bahwa konvergensi beta absolut terjadi jika terdapat korelasi negatif antara tingkat pendapatan per kapita awal periode dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ($\beta_1 < 0$). Pada tabel berikut ini adalah hasil pengujian model analisis konvergensi tanpa adanya perubahan kebijakan dimana β_1 dilambangkan dengan variabel PDRB Per Kapita Awal ($\ln Y_0$) dengan disertai nilai R-Squared dan Adjusted R-Squared yang bermakna seberapa besar pengaruh variabel bebas atau variabel independent (variabel X) terhadap variabel terikat atau variabel independent (variabel Y), sehingga besarnya kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat diprediksi yang kemudian dapat digunakan untuk mencerminkan seberapa besar pengaruh variabel lain terhadap variabel Y diluar dari pengaruh variabel X yang terdapat dalam model analisis

Tabel 1: Hasil Uji Konvergensi Tanpa Adanya Perubahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2016

Variable	Coefficient	Standart Error	Probability
Konstanta	1,0328***	0,00395	0,000
PDRB Per Kapita Awal ($\ln Y_0$)	-0,0057***	0,00136	0,000
R-Squared	0,0710		
Adjusted R-Squared	0,0670		

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Dalam Tabel 1 Hasil Uji Konvergensi Tanpa Adanya Perubahan Kebijakan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2016 diatas maka dapat diketahui bahwa koefisien PDRB per kapita awal bernilai negatif dengan nilai sebesar -.00057 dan signifikan pada taraf 1%. Hal ini menandakan terjadinya konvergensi tanpa adanya perubahan kebijakan di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu tahun 2007-2016 karena nilai pada variabel β_1 memiliki nilai negatif atau < 0 . Selanjutnya terdapat nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,0670 yang menandakan besarnya pengaruh variabel PDRB Per Kapita Awal ($\ln Y_0$) terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,7% dan

variabel-variabel lain diluar model analisis diatas memiliki pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 93,3%.

B. Hasil Uji Konvergensi Dengan Adanya Kebijakan-Kebijakan Perekonomian

Konvergensi kondisional/bersyarat adalah perhitungan model konvergensi yang mempertimbangkan karakteristik-karakteristik pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Hipotesis konvergensi kondisional/bersyarat mempunyai asumsi bahwa terdapat korelasi negatif tingkat pendapatan perkapita periode awal dan tingkat pertumbuhan yaitu jika variabel pendapatan perkapita bernilai negatif, $= < 0$, teori ini kemudian dapat diakomodasikan pada observasi empiris tentang konvergensi jika ada heterogenitas perekonomian antar wilayah observasi. Pada tabel berikut ini adalah hasil pengujian model analisis konvergensi dengan adanya kebijakan-kebijakan perekonomian dimana β_1 dilambangkan dengan variabel PDRB Per Kapita Awal ($\ln Y_0$) dengan disertai nilai R-Squared dan Adjusted R-Squared yang bermakna seberapa besar pengaruh variabel bebas atau variabel independent (variabel X) terhadap variabel terikat atau variabel independent (variabel Y), sehingga besarnya kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat diprediksi yang kemudian dapat digunakan untuk mencerminkan seberapa besar pengaruh variabel lain terhadap variabel Y diluar dari pengaruh variabel X yang terdapat dalam model analisis.

Tabel 2: Hasil Uji Konvergensi Dengan Adanya Kebijakan-Kebijakan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2016

Variable	Coefficient	Standart Error	Probability
Konstanta	1,2004***	0,0411	0,000
PDRB Per Kapita Awal ($\ln Y_0$)	-0,0437***	0,0150	0,004
<i>Pertanian</i>	0,5996***	0,0177	0,001
<i>Perdagangan</i>	0,4892***	0,0092	0,000
<i>GovKes</i>	1,2034***	0,0397	0,003
<i>GovPend</i>	0,1110	0,0330	0,737
<i>Pertanian * LNY₀</i>	-0,0165***	0,0049	0,001
<i>Perdagangan * LNY₀</i>	-0,0082***	0,0018	0,000
<i>Govkes * LNY₀</i>	-0,0419***	0,0133	0,002
<i>GovPend * LNY₀</i>	0,0034	0,0110	0,752
R-Squared	0,2819		
Adjusted R-Squared	0,4173		

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien pendapatan per kapita awal adalah sebesar -0.0437 dengan signifikansi pada taraf 1%, nilai angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai koefisien β_1 pada hasil perhitungan konvergensi beta absolut. Hal ini menandakan bahwa variabel-variabel yang terdapat dalam model perhitungan konvergensi beta bersyarat/kondisional memiliki kontribusi dalam mempercepat konvergensi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2007-2016. Selanjutnya terdapat nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,4173 yang menandakan besarnya pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependen yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 41,7% dan variabel-variabel lain diluar model analisis diatas memiliki pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 58,3%.

Berdasarkan hasil perhitungan konvergensi beta kondisional didapatkan variabel yang berpengaruh dan signifikan, dan variabel yang berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun percepatan konvergensi. Variabel yang berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Motor Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, sementara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila koefisien dari variabel tersebut bernilai positif artinya variabel tersebut mempercepat pertumbuhan ekonomi, apabila koefisien dari variabel tersebut bernilai negatif artinya variabel tersebut memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Diskusi Pengujian Hipotesis dan Hasil Pembahasan

A. Diskusi Hasil Uji Konvergensi Tanpa Adanya Perubahan Kebijakan

Dalam hipotesis konvergensi beta absolut dikatakan bahwa perekonomian daerah tertinggal cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian daerah maju tanpa mensyaratkan perbedaan karakteristik perekonomian apapun sehingga daerah tertinggal akan cenderung untuk mengejar daerah maju dalam hal tingkat pendapatan per kapita atau produk tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional (Barro & Sala-i-Martin, 2004). Dengan adanya hal tersebut, PDB riil di daerah-daerah tertinggal cenderung untuk mendekati tingkat PDB riil di daerah-daerah maju sehingga terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi (Butkus & Pukeliene, 2012).

Tabel 3: Diskusi Hasil Uji Konvergensi Tanpa Adanya Perubahan Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2016

Variable	Coefficient
β_1	-0,0057***
Speed of Convergence	0,0005
Half-Time	1204,441

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui koefisien PDRB per kapita awal bernilai negatif sehingga hipotesis konvergensi tanpa adanya perubahan kebijakan telah terjadi dan kemudian dapat pula dihitung percepatan konvergensinya, yaitu sebesar 0,057 persen per tahun dan separuh waktu (Half-Time) yang dibutuhkan daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju adalah selama 1204 tahun. Berdasarkan gambar 1.3 dan gambar 4.2 mengenai rata-rata pendapatan perkapita kabupaten/kota Jawa Barat dan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita kabupaten/kota Jawa Barat menunjukkan bahwa beberapa daerah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi cenderung memiliki pertumbuhan pendapatan per kapita rendah. Sebaliknya, daerah-daerah yang berpendapatan per kapita rendah cenderung memiliki pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi. Oleh karena itu, dapat dimungkinkan terjadi konvergensi pendapatan per kapita di Jawa Barat. Daerah yang memiliki PDRB per kapita tinggi tetapi pertumbuhannya rendah bahkan dibawah pertumbuhan PDRB per kapita rata-rata Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Cimahi. Selanjutnya, terdapat daerah-daerah yang mempunyai PDRB per kapita rata-rata dibawah PDRB per kapita rata-rata Jawa Barat dan mempunyai pertumbuhan diatas pertumbuhan PDRB per kapita rata-rata Jawa Barat antara lain Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Banjar, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

B. Diskusi Hasil Uji Konvergensi Dengan Adanya Kebijakan-Kebijakan Perekonomian

Konvergensi beta bersyarat/kondisional menyatakan bahwa daerah tertinggal akan mengejar ketertinggalannya dari daerah maju dengan syarat terpenuhinya karakteristik-karakteristik perekonomian tertentu yang dapat memacu daerah tertinggal untuk masuk dalam kondisi catching up effect sehingga pada akhirnya konvergensi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terjadi.

Tabel 4: Diskusi Hasil Uji Konvergensi Dengan Adanya Kebijakan-Kebijakan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2016

Variable	Coefficient
$\beta_1 = \alpha_0$	-0,0437***
Speed of Convergence	0,0044
Half-Time	154,932

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui koefisien PDRB per kapita awal bernilai negatif sehingga hipotesis konvergensi dengan adanya kebijakan-kebijakan perekonomian telah terjadi dan kemudian dapat pula dihitung percepatan konvergensinya, yaitu sebesar 0,44 persen per tahun dengan separuh waktu (Half-Time) wilayah tertinggal mengejar ketertinggalan daerahnya terhadap wilayah maju adalah selama 154 tahun, angka percepatan konvergensi dan half time pada konvergensi dengan adanya kebijakan-kebijakan perekonomian memiliki angka percepatan konvergensi lebih besar dan dan half time yang lebih kecil jika dibandingkan dengan konvergensi

tanpa adanya perubahan kebijakan, hal ini menandakan heterogenitas perekonomian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mampu mempercepat proses terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2016.

Diskusi dan Pembahasan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Berdasarkan perhitungan pada model konvergensi beta bersyarat/kondisional didapatkan variabel PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai koefisien sebesar 0,5996 dan nilai probabilitas 0.001. Hal ini menandakan variabel PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan per kapita sebesar 1 poin akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 0,5996. Kemudian didapatkan variabel PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan dikalikan PDRB Per kapita awal (LnYo) memiliki nilai koefisien sebesar -0,0165 dengan nilai probabilitas 0.001 dengan penjelasan seperti pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5: Percepatan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Variable	Coefficient
PDRB Per Kapita Awal (LNYo)	-0.0437***
<i>Pertanian * LnYo</i>	-0.0165***
$\beta_1 = \alpha_0'$	-0.0621
Speed of Convergence	0.006214
Half-Time	111.5380

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui variabel PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan konvergensi, sehingga jika pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian maka koefisien percepatan konvergensi akan menjadi -0,0621 sehingga kecepatan konvergensi menjadi sebesar 0,62 persen per tahun dengan separuh waktu (Half-Time) wilayah tertinggal mengejar ketertinggalan daerahnya terhadap wilayah maju adalah selama 111 tahun.

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang sektor perekonomiannya di dominasi oleh industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Menurut Johnston & Mellor (1961), sektor pertanian memainkan peranan aktif dalam pertumbuhan ekonomi melalui hubungan produksi dan konsumsi, produktivitas yang lebih tinggi di sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan penduduk pedesaan, sehingga menciptakan permintaan untuk hasil industri yang diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu peningkatan produksi pada sektor pertanian akan menyebabkan terjadinya peningkatan bahan mentah untuk produksi pada sektor industri pengolahan yang dimana akan menurunkan biaya produksi karena semakin mudah didapatkannya bahan baku untuk industri, ataupun dengan meningkatnya sektor pertanian maka akan menurunkan biaya konsumsi rumah tangga yang dikarenakan semakin banyak dan mudah didapatkannya kebutuhan pangan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terjadinya penurunan biaya konsumsi rumah tangga dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya.

Diskusi dan Pembahasan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor

Berdasarkan perhitungan pada model konvergensi beta bersyarat/kondisional didapatkan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor dengan nilai koefisien sebesar 0.48923 dan nilai probabilitas 0.000. Hal ini menandakan variabel PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan variabel PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor per kapita sebesar 1 poin akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 0.48923. Kemudian didapatkan variabel PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor dikalikan PDRB Per kapita awal (LnYo) memiliki nilai koefisien -0,0082583 dengan nilai probabilitas 0,000 dengan penjelasan seperti pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6: Percepatan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor

Variable	Coefficient
PDRB Per Kapita Awal (LnYo)	-0.0437***
<i>Perdagangan</i> * LnYo	-0.0082***
$\beta_1 = \alpha_0'$	-0.0519
Speed of Convergence	0.005338
Half-Time	129.8422

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui variabel PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan konvergensi, sehingga jika pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pembangunan pada sektor perdagangan maka koefisien percepatan konvergensi akan menjadi -0,0519 sehingga kecepatan konvergensi menjadi sebesar 0,53 persen per tahun dengan separuh waktu (Half-Time) wilayah tertinggal mengejar ketertinggalan daerahnya terhadap wilayah maju adalah selama 129 tahun.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkontribusi terbesar ketiga ke setelah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Menurut Zahongo (2017), Model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi bervariasi tergantung pada kekuatan keunggulan komparatif yang mengorientasikan sumber daya ekonomi. Selanjutnya dikatakan suatu negara atau daerah yang memiliki keunggulan komparatif atau kompetitif maka menunjukkan keunggulan baik dalam potensi alam, penguasaan teknologi, maupun kemampuan managerial dalam kegiatan yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Zahongo, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya perbedaan pada kekuatan keunggulan komparatif di setiap wilayah kabupaten/kota, oleh karena itu perlu adanya peningkatan keunggulan komparatif terutama pada sektor sumber daya alam, penguasaan teknologi, ataupun penguasaan teknologi pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Diskusi dan Pembahasan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Berdasarkan perhitungan pada model konvergensi beta bersyarat/kondisional didapatkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan nilai koefisien sebesar 1,2034 dan nilai probabilitas 0,003. Hal ini menandakan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan per kapita sebesar 1 poin akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 1,2034. Kemudian didapatkan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dikalikan PDRB Per kapita awal (LnYo) memiliki nilai koefisien -0,0419 dengan nilai probabilitas 0,002 dengan penjelasan seperti pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7: Percepatan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Variable	Coefficient
PDRB Per Kapita Awal (LnYo)	-0,0437***
<i>GovKes</i> * LnYo	-0,0419***
$\beta_1 = \alpha_0'$	-0,0857
Speed of Convergence	0,00896
Half-Time	77,35939

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan konvergensi, sehingga jika pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pembangunan melalui Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan maka koefisien percepatan konvergensi akan menjadi -0,0857 sehingga kecepatan konvergensi menjadi sebesar 0,89 persen per tahun dengan separuh waktu (Half-Time) wilayah tertinggal mengejar ketertinggalan daerahnya terhadap wilayah maju adalah selama 77 tahun.

Menurut Mushkin's health-led growth, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan adalah jenis modal, dengan demikian, investasi pada kesehatan dapat meningkatkan pendapatan dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui dampaknya pada akumulasi modal

manusia dan fisik (Mushkin, 1962). Sementara menurut Harris (2000), pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki implikasi baik untuk nilai sumber daya manusia saat ini dan untuk pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan peningkatan pada pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal dan manusia fisik untuk saat ini maupun pertumbuhan jangka panjang, sehingga ketika pengeluaran pemerintah bidang kesehatan ditingkatkan pada wilayah-wilayah tertinggal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah tersebut yang berdampak pada semakin cepatnya percepatan konvergensi.

Diskusi dan Pembahasan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Berdasarkan perhitungan pada model konvergensi beta bersyarat/kondisional didapatkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan nilai koefisien sebesar 0,1110 dan nilai probabilitas 0.737. Hal ini menandakan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan per kapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan per kapita sebesar 1 poin tidak akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita karena tidak signifikan. Kemudian didapatkan variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dikalikan PDRB Per kapita awal (LnYo) memiliki nilai koefisien 0.0034 dengan nilai probabilitas 0.752 dengan penjelasan seperti pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8: Percepatan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Variable	Coefficient
PDRB Per Kapita Awal (LnYo)	-0,0437***
<i>GovPend</i> * LnYo	0,0034
$\beta_1 = \alpha_0'$	-0,0437
Speed of Convergence	0,0044
Half-Time	154,9326

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan per kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap percepatan konvergensi, sehingga jika pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pembangunan melalui Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan maka koefisien percepatan konvergensi akan tetap pada angka -0.0437 sehingga kecepatan konvergensi tetap sebesar 0,44 persen per tahun dengan separuh waktu (Half-Time) wilayah tertinggal mengejar ketertinggalan daerahnya terhadap wilayah maju adalah selama 154 tahun mengikuti hasil olahan Konvergensi beta bersyarat/kondisional pada tabel 4.

Menurut Mukherjee (2007), investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk mendorong ekonomi apapun ke tingkat yang lebih tinggi produktivitas dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pendidikan dapat meningkatkan mobilitas kerja, mengurangi tingkat pengangguran dalam ekonomi, meningkatkan penghasilan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja negara, meningkatkan akses ke informasi kesehatan yang akan meningkat harapan hidup. Berdasarkan pendapat Mukherjee di atas maka dapat diketahui bahwa peningkatan pendidikan melalui investasi atau dalam artian lain melalui investasi dalam pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut tidak terjadi di Provinsi Jawa Barat karena berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 2, terdapat hasil yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap percepatan konvergensi..

C. Rangkuman Pengujian Hasil

Berdasarkan mengenai penjelasan Hasil Uji Statistik dan Diskusi Pengujian Hipotesis dan Hasil Pembahasan maka akan diketahui mengenai rangkuman dari hasil-hasil penjelasan sebelumnya seperti dirangkum pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9: Ringkasan Pengujian Hasil Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2016

Variable	Coefficient	Probability	Half-Time
Konvergensi Tanpa Adanya Perubahan Kebijakan	-0,0057***	0,000	1204 tahun
Konvergensi Dengan Adanya Kebijakan-Kebijakan Perekonomian	0,0437***	0,004	154 tahun
<i>Pertanian * LnYo</i>	-0.0621***	0,001	111 tahun
<i>Perdagangan * LnYo</i>	-0.0519***	0,000	129 tahun
<i>Govkes * LnYo</i>	-0,0857***	0,002	77 tahun
<i>GovPend * LnYo</i>	0,0437	0,752	154 tahun

Keterangan: *** signifikan pada taraf 1%, Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019.

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengarah menuju konvergensi. Kemudian dengan hasil pengujian dua model analisis konvergensi yaitu model analisis konvergensi tanpa adanya perubahan kebijakan dan model analisis Konvergensi Dengan Adanya Kebijakan-Kebijakan Perekonomian maka dapat diketahui proses waktu konvergensi pertumbuhan ekonomi memiliki perbedaan pada lama separuh waktu (half time) daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya melalui proses catching up effect. jika proses konvergensi terus dibiarkan tanpa adanya perubahan kebijakan atau secara alamiah maka separuh waktu konvergensi akan terjadi dalam kurun waktu 1204 tahun. Lamanya separuh waktu konvergensi jika dibiarkan secara alamiah terjadi karena masih terdapat pertumbuhan pendapatan perkapita yang tinggi pada wilayah-wilayah maju jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah tertinggal, sehingga dapat dikatakan wilayah-wilayah maju di Provinsi Jawa Barat masih jauh dalam menuju kondisi steady state. Sementara jika proses konvergensi dengan adanya kebijakan-kebijakan perekonomian yang dilihat dari PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor, sektor Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan sektor Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan maka akan didapatkan separuh waktu yang lebih cepat menuju konvergensi pertumbuhan ekonomi yaitu dalam kurun waktu 154 tahun.

Kemudian setelah diketahui hasil separuh waktu dari proses konvergensi dengan adanya kebijakan-kebijakan perekonomian, maka selanjutnya dapat diketahui juga separuh waktu dari masing-masing kebijakan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini. Jika dilihat dari hasil separuh waktu dari PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan maka akan didapatkan separuh waktu konvergensi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 111 tahun, hal tersebut bisa terjadi ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pembangunan kearah sektoral pertanian, kemudian jika dilihat hasil separuh waktu dari PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor maka akan didapatkan separuh waktu konvergensi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 129 tahun hal tersebut bisa terjadi ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pembangunan kearah sektoral perdagangan, kemudian jika dilihat dari hasil separuh waktu dari sektor Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan maka akan didapatkan separuh waktu konvergensi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 77 tahun hal tersebut bisa terjadi ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pembangunan kearah sektoral kesehatan, dan kemudian jika dilihat hasil separuh waktu dari sektor Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan maka akan didapatkan separuh waktu konvergensi pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama dengan konvergensi dengan adanya kebijakan-kebijakan perekonomian yaitu dalam kurun waktu 154 tahun, hal ini terjadi karena hasil dari uji statistik pada model analisis tersebut tidak signifikan, sehingga ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pembangunan kearah sektoral pendidikan maka konvergensi pertumbuhan ekonomi akan terjadi dalam kurun waktu 154 tahun.

Perbedaan pada lama separuh waktu yang terjadi pada proses konvergensi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat meisyaratkan perlu adanya kebijakan peran pemerintah sebagai salah satu cara untuk mempercepat terjadinya keseimbangan perekonomian. Ketika adanya peran pemerintah maka hal yang diharapkan adalah terdapat kebijakan-kebijakan perekonomian yang mampu mendukung terjadinya catching up effect pada wilayah-wilayah tertinggal melalui

kebijakan perekonomian maupun kebijakan fiskal, sehingga konvergensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu terjadi lebih cepat dari hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini. Oleh karena itu tujuan utama dari hasil penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pendekatan konvergensi pertumbuhan ekonomi baik dengan tanpa adanya perubahan kebijakan atau secara alamiah maupun dengan adanya perubahan kebijakan atau secara kondisional. Variabel-variabel yang diduga dapat mempercepat proses konvergensi pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator untuk arah pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan pendapatan per kapita serta perbedaan karakteristik perekonomian pada masing-masing wilayah di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang berasal dari 26 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan periode penelitian selama 10 tahun yaitu pada tahun 2007-2016. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengujian konvergensi baik tanpa adanya perubahan kebijakan ataupun dengan ada kebijakan-kebijakan perekonomian, dapat diketahui konvergensi pertumbuhan ekonomi terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga dapat dikatakan karakteristik pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengarah menuju konvergensi.
2. Terdapat tiga kebijakan perekonomian yang memiliki peranan penting dalam mempercepat konvergensi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, yaitu: (i) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian, kehutanan dan perikanan; (ii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, dan (iii) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan. Sehingga efektivitas ketiga kebijakan ini sangat menentukan percepatan terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
3. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan percepatan konvergensi. Sehingga, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pengelolaan anggaran dapat dikatakan belum efektif.
4. Perbedaan pada hasil separuh waktu yang didapatkan mengisyaratkan perlu adanya peranan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan perekonomian yang mampu mendukung terjadinya percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka saran yang direkomendasikan antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan produksi sektor pertanian yang digunakan sebagai bahan baku sektor industri agar terjadi peningkatan *value added* ataupun untuk dikonsumsi oleh rumah tangga sehingga terjadi peningkatan pola produksi dan konsumsi pada sektor pertanian.
2. Perlu adanya pemerataan sektor perdagangan agar tidak terjadi polarisasi perdagangan di Kota Bandung serta memperluas pusat-pusat perdagangan di Provinsi Jawa Barat terutama pada daerah-daerah tertinggal dengan salah satu cara meningkatkan keunggulan komparatif pada daerah-daerah tersebut.
3. Perlu ditingkatkannya anggaran bidang kesehatan di daerah-daerah tertinggal Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang sangat mempengaruhi proses konvergensi pertumbuhan ekonomi.
4. Perlu ditingkatkannya efektivitas struktur belanja pemerintah terutama pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan konvergensi di Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeniyi, O.M., & Bashir, A.O. 2011. Sectoral Analysis of the Impact of Public Investment on Economic Growth in Nigeria 1970-2008. *European Journal of Social Sciences*, Vol.20, (No.1) : 259-266.
- Amalia, S.K. 2017. *Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Armstrong, H., & Taylor, J. 2000. *Regional Economics and Policy* (3rd Edition). Great Britain: Blackwell Publishing.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2018. *Jawa Barat Dalam Angka, 2017*. Bandung: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Baltagi, B.H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd Edition). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. 1992. Convergence. *Journal of Political Economy*, Vol.100, (No.2) : 223-251.
- Barro, R.J., & Sala-i-Martin, X. 2004. *Economic Growth*. London: The MIT Press.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Butkus, M., & Pukeliene, V. 2012. Evaluation of Regional β Convergence in EU Countries at NUTS3 Level. *Ekonomika*, Vol.91, (No.2) : 22-37.
- Dornbusch, R., & Startz, F. 1997. *Makroekonomi Terjemahan* (Edisi Keempat). Jakarta: Erlangga.
- Ekananda, M. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gasparini, L., & Lustig, N. 2011. *The Rise And Fall Of Income Inequality In Latin America*. New Orleans: Tulane University.
- Gujarati, D.N., & Porter, D.C. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Edisi Kelima). Jakarta: Salemba.
- Harris, J.M. 2000. Basic Principles of Sustainable Development. *Global Development and Environment Institute Working Paper*, (No.04) : 1-25.
- Johnston, B., & Mellor, J. 1961. The Role of Agriculture in Economic Development. *American Economic Review*, Vol.51, (No.4) : 56-93.
- Malik, A. 2014. Analisis Konvergensi Antar Provinsi di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012. *JEJAK Journal of Economic and Policy*, Vol.7, (No.1) : 92-101.
- Mankiw, N.G. 2007. *Teori makroekonomi* (Edisi Ketujuh). Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Matsuyama, K. 1992. Agricultural Productivity, Comparative Advantage, and Economic Growth. *Journal Of Economic Theory*, (No.58) : 317-334.
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Mukherjee, A. 2007. Public Expenditure on Education : A Review of Selected Issues and Evidence. *Economic and Political Weekly*, Vol.42, (No.14) : 71-76.
- Mushkin, S.J. 1962. Health as an Investment. *Journal of Political Economy*, Vol. 70, (No.129).
- Musgrave, R. 1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw.
- Paas, T., Kuusk, A., Schlitte, F., & Vörk, A. (2007). *Econometric Analysis of Income Convergence in Selected EU Countries and Their Nuts 3 Level Regions*. Tartu University Press, Working Papers.

- Rahardjo, D. 1984. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Richardson, H.W. 1991. *Dasar- Dasar Ilmu Ekonomi Regional (Penerjemah: Paul Sitohang)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ruin, J.E. 2003. *Audit Committee, Going Forward Towards Corporate Governance*. Kuala Lumpur: Malaysian Institute of Corporate Governance (MICG).
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Solow, R. 1956. A Contribution to The Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics (The MIT Press)*, Vol.70, (No.1) : 65–94.
- Stiglitz, J.,E. 1986, *Economics of the Public Sector*, New York: WW Northon & Company.
- Sugihariti, L. 2012. *Desentralisasi Fiskal, Migrasi Internal, dan Konvergensi Pendapatan Regional di Jawa Timur*. Tesis. Surabaya: Univeristas Airlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. 1998. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Todaro, M.P., & Stephen, C.S. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- Valdés, B. 2003. An Application of Convergence Theory to Japan's Post-WWII Economic "Miracle". *Journal of Economic Education*, Vol.34, (No.1) : 61-81.
- Wanner, R.A., & Pevalin D. 2005. *Advanced Seminar on Panel regression (using STATA)*. Calgary: University of Calgary.
- Wibisono, Y. 2003. "Konvergensi di Indonesia: Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol.51, (No.1), : 53-82.
- Wiyati, R.B. 2004. *Konvergensi Pembangunan Antardaerah Di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 1993-2000*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Yudhoyono, S.B. 2004. *Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Zahongo, P. 2017. Trade and economic growth in developing countries: Evidence from sub-Saharan. *Africa Journal Of African Trade*, (No.012) : 16, Université Ouaga.